

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)**

Pada penelitian ini, landasan teori yang digunakan berdasarkan pada teori penetapan tujuan (*Goal Setting Theory*). Teori penetapan tujuan adalah bagian dari teori motivasi Edwin Locke dari tahun 1978. Teori penetapan tujuan didasarkan pada bukti yang mengasumsikan bahwa tujuan (gagasan tentang masa depan; keadaan yang diinginkan) memainkan peran penting dalam tindakan (Locke, 1968). Pada organisasi sektor publik, terutama di pemerintah daerah, diperlukan orang-orang terlatih dengan keterampilan dan kemampuan khusus untuk mengembangkan rencana strategis sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka secara efektif dan efisien, sehingga dapat mempengaruhi kontrol layanan secara berkelanjutan (Rodríguez Bolívar dkk., 2018). Ketika pemerintah mengetahui tujuan yang konkrit, maka motivasi untuk mencapai tujuan tersebut semakin tinggi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempertimbangkan faktor pendorong atau faktor dalam keberlanjutan keuangan daerah.

Pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan tujuan khusus pemerintah daerah. Kemandirian keuangan, yang tercermin dari tingginya bagian pendapatan kota dalam pendapatan total, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak sepenuhnya bergantung pada layanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk lebih menopang penyelenggaraan pelayanan publik (Nugroho, 2017). Selain itu, pemerintah daerah harus menyadari kemampuan membayar utangnya untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, agar tidak mengganggu pengeluaran non-operasional, seperti belanja modal pada pelayanan publik. Utang Daerah, yang diperhitungkan dengan menggunakan rasio utang terhadap pendapatan terkait dengan

kelangsungan hidup organisasi. Semakin tinggi utang terhadap pendapatan, semakin besar kemungkinan organisasi tidak mampu membayar utang jangka panjang (Turley dkk., 2015). Dari sisi belanja, pemerintah daerah juga harus menentukan besaran belanja yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik, sehingga belanja tersebut tidak mendominasi dalam APBD, untuk mencapai kesinambungan pelayanan di daerah dengan pengelolaan keuangan yang efektif. Selain menentukan pendapatan dan pengeluaran, pemerintah daerah juga harus memperhatikan hubungan antara hasil keuangan dan profitabilitas, meskipun ini bukan tujuan utama Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah lebih baik ketika kinerja keuangan rendah tetapi nilainya positifnya tinggi dibandingkan dengan nilai kinerja keuangan yang besar tetapi bertanda negatif (Cohen, 2008).

### **2.1.2 *Financial Sustainability***

Menurut Slembeck dkk. (2014) *Financial Sustainability* merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk mempertahankan surplus maksimum dalam jangka panjang untuk melunasi biaya pembayaran utang pemerintah. Brothaler dkk. (2015) juga menyatakan bahwa *Financial Sustainability* adalah sebuah kemampuan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi atau pinjaman dalam membiayai investasi. *Financial Sustainability* (Keberlanjutan keuangan) dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan saat ini tanpa mengorbankan kemampuannya untuk melakukannya di masa depan, dan konsep secara luas mencakup tiga aspek terkait layanan, pendapatan, dan utang (Rodríguez Bolívar dkk., 2018).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Financial Sustainability* merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah mengelola kebutuhannya saat ini tanpa mengurangi kemampuannya di masa depan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan mempertahankan surplus maupun pendapatan untuk dapat melunasi utang ataupun pinjaman pemerintah. Dalam penelitian ini *Financial Sustainability* diukur dengan membagi jumlah belanja modal dengan total pendapatan daerah (Wardhani, 2022). Belanja modal memegang peranan penting dalam mewujudkan kuantitas dan kualitas pelayanan

yang akan diterima masyarakat. Jika pengelolaan pendapatan untuk pemeliharaan dan regenerasi aset dilakukan secara optimal, maka keberadaan masyarakat lokal akan terjaga sehingga pelayanan publik tidak terhambat dan berkelanjutan.

### **2.1.3 Kemandirian Keuangan**

Menurut Arpani dan Halmawati (2020) Kemandirian keuangan pada pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat dimana sudah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah. Kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mendanai dan menyelenggarakan otonomi daerah. Kemandirian keuangan juga menunjukkan seberapa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan yang semakin tinggi berarti tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat berkurang dan dianggap mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, sebaliknya rasio kemandirian keuangan yang semakin rendah berarti pemerintah pusat lebih dominan dalam membantu penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan suatu daerah merupakan hasil perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut (Tahar & Zakhiya, 2011). Selain itu, kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari upaya pemerintah daerah untuk melaksanakan hak keuangan secara efisien dan efektif (Ritonga, 2014). Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa kemandirian keuangan merupakan suatu kemampuan pemerintah dalam membiayai dan menyelenggarakan sendiri kegiatan dalam pemerintahannya tanpa tergantung dengan dana dari pemerintah pusat.

### **2.1.4 Efisiensi Keuangan**

Menurut Saraswati (2018) efisiensi keuangan merupakan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan output yang maksimal

dengan input yang minimal atau terbatas. Semakin tinggi tingkat efisiensi pemerintah daerah maka semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Pada penelitian ini variabel efisiensi keuangan diukur dengan membandingkan total belanja daerah dengan belanja pegawai (Ritonga dkk., 2019). Jika pemerintah daerah dapat menekan biaya pegawai, belanja untuk peningkatan pelayanan publik dapat meningkat, sehingga kesinambungan keuangan daerah akan mudah dicapai. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa efisiensi keuangan adalah suatu kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola besarnya pengeluaran biaya untuk mendapatkan realisasi pendapatan yang diterimanya.

### **2.1.5 Utang Daerah**

Menurut UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Utang Daerah adalah suatu kewajiban yang secara wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Klasifikasi dari akun utang (kewajiban) pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebagaimana tercantum pada tabel berikut (Lampiran PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan).

#### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan sekumpulan kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

##### **a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang yang timbul dari status pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pembayaran

lainnya antara lain Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Akuntansi Pihak Ketiga Lainnya.

b. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan suatu utang yang berbunga yang dimiliki pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bunga Kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga Kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Bunga dalam Negeri lainnya, dan Utang Bunga Luar Negeri.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan suatu utang untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, dan Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan suatu utang yang digunakan untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka yang mencakup antara lain: Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak III, Uang Muka Penjualan, dan Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.

e. Utang Beban

Utang Beban merupakan suatu utang yang disebabkan karena belum dibayarkannya suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Utang Beban mencakup antara lain: Utang Beban Pegawai, Utang Beban Barang, Utang Beban Bunga, Utang Beban Subsidi, Utang Beban Hibah, Utang Beban Lain-lain, dan Utang Beban Transfer.

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan suatu utang yang digunakan untuk mencatat Utang Jangka Pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi utang di atas.

## 2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan suatu kelompok kewajiban (utang) yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

### a. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri merupakan suatu utang yang digunakan untuk mencatat Utang Dalam Negeri pemerintah daerah yang mencakup antara lain: Utang dari Sektor Perbankan, Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Obligasi, Utang dari Pemerintah Pusat, Utang dari Pemerintah Daerah lainnya, dan Premium (Diskonto) Obligasi.

### b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri merupakan suatu utang yang digunakan untuk mencatat Utang Luar Negeri yang diperoleh pemerintah daerah.

### c. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya merupakan suatu utang yang digunakan untuk mencatat Utang Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam klasifikasi di atas.

Pada penelitian ini utang daerah diukur dengan rasio total utang terhadap total pendapatan (Turley dkk., 2015). Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar utang daerah. Jika utang daerah semakin bertambah melebihi kemampuan pemerintah untuk membayar utang, hal tersebut akan menimbulkan masalah yang penting bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan berada di bawah tekanan yang lebih besar dan beban administrasi meningkat sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan.

### **2.1.6 Kinerja Keuangan**

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran untuk memastikan kemampuan daerah untuk secara benar dalam menerapkan aturan penegakan keuangan untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi dapat menjadi tuntutan yang harus

dipenuhi pemerintah daerah agar pihak eksternal dapat memutuskan untuk berinvestasi pada suatu daerah. Menurut Sari (2016), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah derajat pencapaian hasil pekerjaan di bidang keuangan daerah, yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah dengan kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh sistem keuangan selama periode anggaran. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola dan memanfaatkan aliran pendapatan daerah untuk mendukung berfungsinya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah (Poyoh dkk., 2017).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah atas dasar hasil dari pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan pelayanan masyarakat dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah yang baik. Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan *return on asset* dengan membandingkan *Net Surplus (deficit)* dengan *Total Assets* (Cohen, 2008). Rasio *return on asset* menunjukkan surplus atau defisit yang lebih wajar bagi pemerintah daerah untuk membiayai investasi pemerintah daerah jangka panjang. Jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, maka ada indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi relevansi pada penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dinar Tri Wardhani (2022)	Determinan <i>Financial Sustainability</i> Pada Sektor Pemerintah : Studi Empiris	X <sub>1</sub> : Kemandirian Keuangan Daerah X <sub>2</sub> : Efisiensi Keuangan Daerah X <sub>3</sub> : Utang	Hasil penelitian menunjukkan Kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap <i>Financial</i>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		pada Kabupaten/Kota di Indonesia	Daerah $X_4$ : Kinerja Keuangan Daerah $Y$ : <i>Financial Sustainability</i>	<i>Sustainability</i> ; Efisiensi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i> ; Utang daerah terhadap <i>Financial Sustainability</i> tidak terbukti dalam penelitian ; Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Sustainability</i> ;
2.	Dinar Tri Wardhani dan Payamta (2020)	Menguji Faktor Determinan <i>Financial Sustainability</i> Pada Sektor Pemerintah	$X_1$ : Jumlah Penduduk $X_2$ : Indeks Pembangunan Manusia $X_3$ : PDRB $X_4$ : Kemandirian Keuangan Daerah $X_5$ : Rasio Utang terhadap Pendapatan $Y$ : <i>Financial Sustainability</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan Jumlah penduduk, dan rasio utang pada pendapatan berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Sustainability</i> . Kemandirian keuangan berpengaruh positif terhadap <i>Financial Sustainability</i> . Produk domestik regional bruto dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Sustainability</i> di pemerintah daerah.



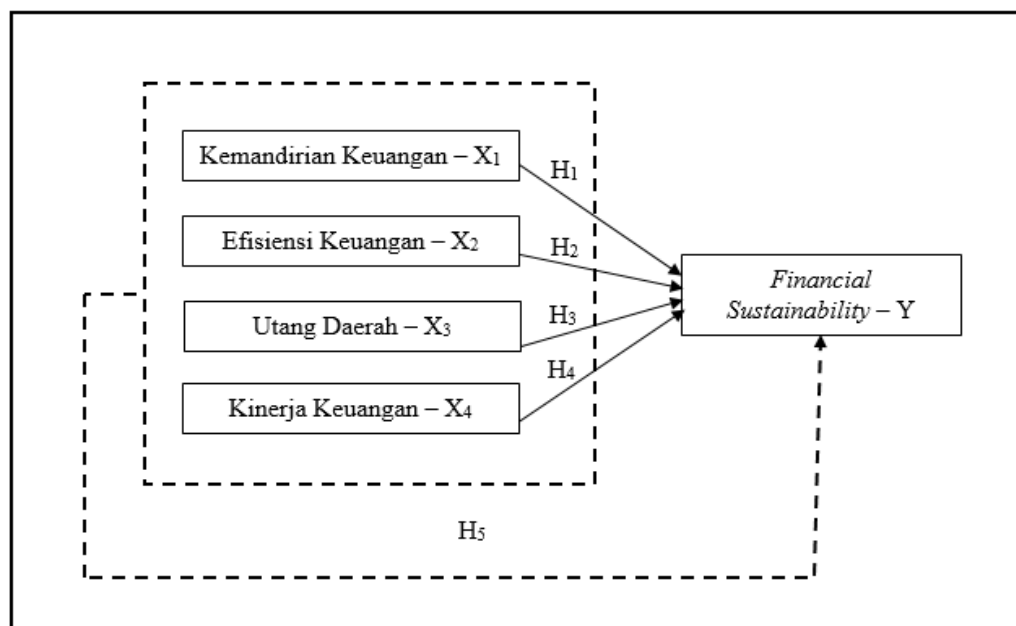
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Muhammad Kadafi dan Amirudin (2020)	<i>Financial Sustainability Dan Financial Performance</i> Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur	$X_1$ : Trend Financial Sustainability $X_2$ : Financial Performance $Y$ : <i>Financial Sustainability</i>  Variabel Kontrol : Rasio belanja modal dengan belanja wajib, Pertumbuhan LGR (Locally Generated Revenue), Share, Elastisitas, Indeks X, dan Indeks Kemampuan Keuangan (FAI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 5 Daerah/kota yang memiliki <i>Financial Sustainability</i> di atas rata-rata dan 5 daerah/kota dengan nilai di bawah dengan rata-rata Selama 5 tahun, <i>Trend Financial Sustainability</i> telah tumbuh, dari nilai 40,77%, 36,45%, 29.07%. Pada tahun 2018 itu meningkat sebesar 47,34%, kemudian pada 2019 menurun lagi sebesar 36,72%. Peta kinerja LGR menggunakan Quadrant Metode, tidak ada distrik/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang termasuk dalam Quadrant 1 yang diklasifikasikan sebagai yang ideal. Di Quadrant 2 adalah East Kutai District, North Penajam Paser dan Mahakam Hulu. Daerah-daerah dalam kuadran ini adalah dianggap tidak ideal. Dalam Quadrant 3, ada tiga distrik/kota, yaitu Kota

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Balikpapan, Berau Regency, Samarinda dan Bontang. Dalam kuadran ini, kelompok ini tidak ideal. Dalam kondisi buruk, mereka ditempatkan di Quadrant 4. anggotanya adalah Kutai Kertanegara dan Kutai Barat, dan Paser Regencies.

Sumber : Data diolah 2023.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta konsep dan teori yang telah peneliti buat sebelumnya, maka dapat dinyatakan mengenai hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini yang dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- = Uji secara Parsial
- = Uji secara Simultan
- H<sub>1</sub> = Hipotesis 1
- H<sub>2</sub> = Hipotesis 2
- H<sub>3</sub> = Hipotesis 3
- H<sub>4</sub> = Hipotesis 4
- H<sub>5</sub> = Hipotesis 5

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017: 105) menegaskan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berdasarkan kerangka penelitian yang telah dibuat penulis, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut.

### 2.4.1 Hubungan antara Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability*

Kemandirian keuangan menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mendanai dan menyelenggarakan otonomi daerah. Kemandirian keuangan suatu daerah merupakan hasil perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Selanjutnya, kemandirian keuangan daerah direpresentasikan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dari upaya pemerintah daerah untuk menggunakan hak keuangan secara efisien dan efektif (Ritonga, 2014). Kemandirian keuangan juga menunjukkan seberapa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Meningkatkan pelayanan publik dari pendapatan daerah akan mencapai kesinambungan keuangan yang lebih besar, karena pendanaan tidak bergantung pada utang atau transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan hipotesis atas hubungan antara Kemandirian keuangan terhadap *Financial Sustainability* sebagai berikut.

**H<sub>1</sub> : Diduga ada pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan**

#### **2.4.2 Hubungan antara Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Sustainability***

Menurut Ritonga (2019) efisiensi keuangan pemerintah daerah dapat mempengaruhi kuantitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Secara praktik, efisiensi keuangan yang baik dapat mengurangi biaya per unit barang dan jasa, sehingga pemerintah daerah dapat menyediakan lebih banyak barang dan jasa kepada masyarakat, sehingga lebih mudah bagi pemerintah daerah untuk mencapai keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) dan siap dalam menghadapi ketidakpastian pendanaan pemerintah di masa mendatang. Pada penelitian ini yang efisiensi keuangannya lebih difokuskan pada biaya pegawai. Biaya pegawai menjadi perhatian utama Kementerian Keuangan dimana Sekitar 70 persen alokasi dana APBD digunakan untuk biaya kepegawaian ketimbang kebutuhan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Semakin rendah proporsi belanja pegawai dalam APBD yang digunakan untuk kepentingan aparatur daerah, maka semakin optimal APBD dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi belanja yang digunakan untuk melayani masyarakat, misalnya sebagai belanja modal. Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan hipotesis atas hubungan antara Efisiensi keuangan terhadap *Financial Sustainability* sebagai berikut.

**H<sub>2</sub> : Diduga ada pengaruh Efisiensi Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan**

#### **2.4.3 Hubungan antara Utang Daerah terhadap *Financial Sustainability***

Utang Daerah merupakan suatu kewajiban yang secara wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat berupa pinjaman. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam membayar utang daerah melalui pendapatan daerah, pada penelitian ini utang daerah diukur dengan rasio utang terhadap pendapatan (*debt to total revenue*). Rasio digunakan untuk mengukur hubungan antara kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dengan beban utangnya. Semakin tinggi rasio utang terhadap pendapatan, maka semakin besar beban utang. Sehingga akan menimbulkan kerentanan (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2019). Jika utang daerah semakin bertambah melebihi kemampuan pemerintah untuk membayar utang, hal tersebut akan menimbulkan

masalah yang penting bagi pemerintah daerah. Tingkat utang yang lebih tinggi akan menjadi beban bagi generasi yang akan mendatang sehingga keberlanjutan keuangan pemerintah akan tidak baik pula. Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan hipotesis atas hubungan antara Utang Daerah terhadap *Financial Sustainability* sebagai berikut.

**H<sub>3</sub> : Diduga ada pengaruh Utang Daerah terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan**

#### **2.4.4 Hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability***

Kinerja Keuangan yang merupakan suatu kemampuan pemerintah daerah atas dasar hasil dari pekerjaannya dalam memenuhi kebutuhan pemerintah dan pelayanan masyarakat dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran daerah yang baik. Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan *return on asset* dikarenakan rasio tersebut dapat menunjukkan surplus atau defisit yang lebih wajar bagi pemerintah daerah untuk membiayai investasi pemerintah daerah jangka panjang. Jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang baik, maka ada indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut mampu memberikan pelayanan yang berkesinambungan. Sedangkan, jika pemerintah daerah memiliki kinerja keuangan yang buruk maka pemerintah daerah tidak akan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan menimbulkan berbagai masalah bagi penduduk setempat. Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan hipotesis atas hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* sebagai berikut.

**H<sub>4</sub> : Diduga ada pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan**

#### **2.4.5 Hubungan antara Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan, Utang Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability***

Pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan tujuan khusus pemerintah daerah. Menurut Navarro-Galera, Muñoz, Subirez, dan Bolivar (2019), daerah yang memiliki lebih banyak sumber

pendapatan eksternal daripada internal dapat menghadirkan risiko yang menghambat *Financial Sustainability*, sehingga kemandirian keuangan yang tinggi dapat menjadi faktor pendorong dalam mencapai *Financial Sustainability*. Pada saat yang sama, pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, terutama dengan meminimalkan pengeluaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik, dapat memunculkan faktor untuk mendorong adanya *Financial Sustainability*. Pemerintah daerah dengan biaya administrasi yang tidak efisien atau tinggi dapat mengurangi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah pada masyarakat (Jin & Zhang, 2011). Winarna, Widagdo & Setiawan (2017) menemukan bahwa faktor yang mempersulitkan pemerintah daerah lebih besar ketika pemerintah daerah mempunyai utang yang banyak. Dimana hasil dari keuangan pemerintah daerah mengacu pada layanan publik, terlepas dari aktivitas pendanaan/profitabilitas bukanlah tujuan utama pemerintah, tetapi dengan adanya surplus pemerintah daerah dapat dengan wajar membiayai investasi pendanaan modal pemerintah (Cohen, 2008). Dari penjelasan tersebut, penulis memberikan hipotesis atas hubungan antara Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* sebagai berikut.

**H<sub>5</sub> : Diduga ada pengaruh Kemandirian Keuangan, Efisiensi Keuangan, Utang Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.**